Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

APBD, Alat Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Idealnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencerminkan manajemen keuangan daerah. Anggaran bisa jadi alat evaluasi kinerja pemda dalam penyelenggaraan pembangunan wilayahnya. Karena itu, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Idealisme yang sama berlaku bagi DKI Jakarta. Dengan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan berdaya serap tinggi, kualitas kehidupan warga Jakarta diharapkan meningkat. Pembangunan fisik kota tumbuh seiring pembangunan manusianya.

Kurun 2009-2018, APBD DKI rata-rata meningkat sekitar 14 persen atau Rp 5,7 triliun per tahun. Pertumbuhan ini sangat tinggi dan menjadikan DKI sebagai pengelola anggaran daerah terbesar di antara 34 provinsi di Indonesia. Pada 2018, APBD Jakarta Rp 75,09 triliun.

Pada 2007-2012, saat DKI dipimpin Gubernur Fauzi Bowo, anggaran belanja rata-rata per tahun sekitar Rp 29 triliun. Pada 2012-2017, saat kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan beralih ke Basuki Tjahaja Purnama serta Djarot Syaiful Hidayat, anggaran belanja meningkat jadi rata-rata Rp 54 triliun setahun.

Saat tampuk pimpinan gubernur beralih ke Anies Baswedan sejak tahun 2017, pos belanja meningkat menjadi rata-rata Rp 68 triliun per tahun. Hal ini mengindikasikan estafet pembangunan membaik dari segi pendanaan.

Prioritas penganggaran

Mengacu pada data realisasi, belanja DKI menunjukkan beberapa sektor yang jadi pusat perhatian. Indikasinya terlihat dari angka realisasi belanja yang besar.

Bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum masing-masing lebih dari Rp 5 triliun. Paling besar adalah sektor pendidikan, rata-rata belanja per tahun lebih dari Rp 12 triliun.

Sektor edukasi ini meningkat drastis sejak 2017 di era Anies. Sepanjang 2012-2016, rata-rata belanja pendidikan per tahun hampir Rp 10 triliun. Sejak 2017, anggaran pendidikan menjadi kisaran Rp 16 triliun dan tahun 2018 menjadi sekitar Rp 18 triliun.

Sektor kesehatan, pada 2017-2018, di kisaran Rp 8 triliun per tahun. Sebelum 2017, realisasi belanja rata-rata setahun tak sampai Rp 5 triliun.

Sektor lain yang melonjak sejak 2017 adalah perumahan, dari kisaran Rp 1 triliun setahun menjadi sekitar Rp 3 triliun. Demikian juga belanja perhubungan dari sekitar Rp 1,4 triliun per tahun sebelum 2017 menjadi kisaran Rp 2,7 triliun di 2018.

Mengelola defisit

Untuk membiayai belanja daerah yang terus meningkat, Pemprov DKI juga mendorong peningkatan pendapatan, antara lain, dengan menambah pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dan dana perimbangan.

Tahun 2009-2018, anggaran pendapatan DKI rata-rata meningkat per tahun sekitar 16 persen atau Rp 5,16 triliun sehingga tahun 2018 anggaran pendapatan diproyeksikan Rp 65,81 triliun. Nominal pendapatan ini jika disandingkan dengan nilai belanja pada 2018 menghasilkan defisit. Artinya, pendapatan lebih kecil dari belanja yang berkisar Rp 75 triliun.

Penganggaran defisit ini juga terjadi sebelum-sebelumnya. Pada rentang 2009-2018, APBD DKI rata-rata defisit lebih dari Rp 3 triliun setiap tahun. Tahun 2018, defisit Rp 9,28 triliun.

Membesarnya defisit APBD, antara lain, disebabkan membesarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun sebelumnya. Secara teori, silpa adalah selisih surplus/defisit anggaran ditambah dengan pembiayaan neto. Dalam APBD, silpa seharusnya nol, yang berarti penerimaan pembiayaan harus menutup defisit anggaran.

Namun, bisa juga silpa positif atau lebih besar daripada nol, yang artinya ada dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai anggaran belanja atau pengeluaran pembiayaan daerah. Silpa positif dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan daerah tahun anggaran berikut. Silpa yang positif terjadi di antaranya karena realisasi belanja tak sesuai target.

Salah satu sumber penerimaan pembiayaan yang penting bagi anggaran daerah adalah silpa karena tidak menimbulkan risiko fiskal seperti pinjaman yang berbunga.

Pada 2009-2018, realisasi pos belanja rata-rata hanya tercapai sekitar 79 persen setahun. Sekitar seperlima anggaran belum termanfaatkan. Dana yang tidak terserap ini lalu terakumulasi dengan sisa pembiayaan neto yang tidak terpakai menjadi silpa.

Tahun 2018, besar silpa Rp 9,76 triliun. Dalam konteks ini, silpa yang besar secara tidak langsung menggambarkan sejauh mana efektivitas penyerapan anggaran.

Pendapatan DKI terbilang kuat. Satu parameternya adalah realisasi pendapatan yang tinggi, sekitar 98 persen dari yang dianggarkan. DKI pun leluasa menjalankan pembangunan yang berdampak pada kualitas hidup warga.

(BUDIAWAN SIDIK A/ LITBANG KOMPAS)